

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar

Dodi Candra¹⁾, Wedy Nasrul²⁾, Muhamad Reza³⁾

¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pertanian UM Sumatera Barat, Padang, Indonesia,
dodicandra564@gmail.com

^{2),3)} Dosen Pascasarjana Ilmu Pertanian UM Sumatera Barat, Padang, Indonesia

Abstrak

Sektor pertanian juga disebut sebagai tulang punggung dalam perekonomian, oleh karena itu negara memprioritaskan pertanian dan ketahanan pangan penduduk dalam situasi sosial sebagai suatu hal yang penting bagi pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program layanan bajak gratis fokus pada bantuan kepada petani dalam bentuk upah dan peminjaman alsintan (handtraktor). Implementasi kebijakan daerah tentang program layanan bajak gratis dapat dikatakan berhasil, karena adanya dukungan dari stakeholders dan komunikasi yang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi bantuan kepada petani hanya untuk mengurangi biaya produksi. Secara keseluruhan tujuan atau dampak kebijakan daerah tentang program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar belum optimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya (petugas, anggaran, sarana dan prasarana) dan struktur birokrasi (standar operasional prosedur dan kebijakan pemerintah).

Kata Kunci: *Evaluasi, implementasi, kebijakan, program layanan bajak gratis.*

Abstract

The agricultural sector is also referred to as the backbone of the economy, therefore the state prioritizes agriculture and food security of the population in social situations as something important for human development. This study aims to evaluate the implementation of policies and determine what factors influence the implementation process of the Regional Government's policy on the "Layanan Bajak Gratis" program in Tanah Datar Regency. The method used in this study is descriptive qualitative with interviews, observations and documentation studies. The data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews using interview guidelines. Secondary data was obtained through a review of documents related to the focus of the study. The results of the study indicate that the implementation of the "Layanan Bajak Gratis" program focuses on assistance to farmers in the form of wages and loans of agricultural machinery (hand tractors). The implementation of regional policies on the "Layanan Bajak Gratis" program can be said to be successful, because there is support from stakeholders and communication that has been running well, but assistance to farmers is only to reduce production costs. Overall, the objectives or impacts of regional policies on the "Layanan Bajak Gratis" program in Tanah Datar Regency have not been optimal, this is due to limited resources (officers, budget, facilities and infrastructure) and bureaucratic structures (standard operating procedures and government policies).

Keywords: *Evaluation, implementation, policy, "layanen bajak gratis" program.*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan komponen ekonomi nasional yang sangat strategis dan penting, karena menghasilkan sebagian besar dari produk domestik bruto negara, memberikan sebagian besar pendapatan ekspor dan mempekerjakan jutaan orang. Sektor pertanian juga disebut sebagai tulang punggung dalam perekonomian, oleh karena itu negara memprioritaskan pertanian dan ketahanan pangan penduduk dalam situasi sosial sebagai suatu hal yang penting bagi pembangunan manusia (Bukhtiarova *et al.*, 2019).

Untuk meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pertanian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerapkan inovasi Layanan Bajak Gratis untuk tanaman padi. Dukungan Pemerintah Daerah masuk dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026. Hal ini dilakukan karena adanya permasalahan tentang biaya pengolahan tanah, menghindari ketergantungan pada tengkulak, pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19 dan adanya kenaikan biaya produksi (Dinas Pertanian Kab Tanah Datar 2022).

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat Indonesia yang beribu kota Batusangkar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 137.716 Ha dengan jumlah penduduk 374.431 jiwa pada tahun 2021. Tanah Datar memiliki 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten ini merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Dari 137.716 ha luas Kab Tanah Datar 62.983 ha atau 45 % penggunaan lahan didominasi oleh sektor pertanian yang terdiri dari sawah 22.170 ha, perkebunan 23.313 ha, hortikultura 17.500 ha (Dinas Pertanian Kab Tanah Datar 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (2021-2024) memiliki 10 Program unggulan 4 program berada pada sektor pertanian, salah satunya yaitu Program Layanan Bajak Gratis. Pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis tahun 2022 diatur dalam Peraturan Bupati No: 54 tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Bupati No: 56 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Layanan Bajak Gratis dan Peraturan Bupati No: 22 tahun 2022 Roadmap Pelaksanaan Program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Dinas Pertanian Kab Tanah Datar 2022).

Sumber daya manusia yang disiapkan untuk pelaksanaan Layanan Bajak Gratis yaitu dukungan penyuluh pertanian, Tenaga IT untuk admin aplikasi dan Brigade Alsintan yang terdiri dari: tenaga administrasi, manager, tenaga mekanik, tenaga sopir dan tenaga keamanan. Disamping SDM, Anggaran untuk pelaksanaan Layanan Bajak Gratis juga disiapkan yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.846.700.000 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Alokasi anggaran digunakan untuk upah operator, biaya BBM bajak gratis, pengadaan handtraktor, kendaraan operasional, Pembangunan shelter, pembuatan media informasi (baliho, banner, spanduk, leaflet), honorarium Brigade, bimtek, sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi (Dinas Pertanian Kab Tanah Datar 2022).

Selain menggunakan SDM dan anggaran, pelaksanaan Layanan Bajak Gratis juga memanfaatkan teknologi. Teknologi yang digunakan yaitu aplikasi *field area measure* untuk pengukuran lahan sawah, aplikasi QGIS untuk pemetaan lahan sawah dan penggunaan website sebagai media kerja, monev dan pelaporan. Target dan realisasi program Layanan Bajak Gratis tahun 2022 di Kabupaten Tanah Datar seluas 4204,49 Ha dari target seluas 4.200 Ha, artinya Layanan Bajak Gratis pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2023 target Layanan Bajak Gratis bertambah sebanyak 100 Ha menjadi 4.300 Ha dibandingkan dengan tahun 2022 seluas 4.200 Ha. Disamping tercapainya target Layanan Bajak Gratis juga ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya yaitu lamanya proses administrasi dan pencairan upah operator. Selama ini evaluasi kebijakan Layanan Bajak Gratis hanya pada target luas sawah sehingga belum diketahui apakah kebijakan tersebut telah memenuhi harapan dan tujuan yang diinginkan (Dinas Pertanian Kab 2023).

Berdasarkan kondisi di atas penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengevaluasi implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar. 2). Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiono (2012) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi. Analisis data juga merupakan suatu kegiatan yang bersifat untuk mentransformasikan data menjadi informasi (Irawan, 2009). Analisis data yang dilakukan berupa, penataan data mentah, editing data, koding data, kategorisasi data, kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Layanan Bajak Gratis

Fokus implementasi kebijakan layanan bajak gratis dalam penelitian dalam ini adalah pemberian bantuan kepada petani. Bantuan kepada petani adalah salah satu kebijakan terpenting Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung ketahanan pangan. Hal ini disebabkan oleh fungsi Dinas Pertanian sebagai lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Fungsi ini hanya bisa dilakukan dengan memberikan bantuan kepada petani.

Implementasi dibatasi pada keputusan kebijakan dasar, umumnya berbentuk Undang-Undang tetapi dapat juga merupakan keputusan eksekutif maupun keputusan pengadilan. Keputusan tersebut bisa mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta cara untuk mengatur pelaksanaannya. Solichin *dalam* Sendary (2023) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses pencapaian suatu tujuan oleh seluruh yang terlibat atas apa yang telah digariskan dalam kebijakan pemerintah.

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi. Untuk mendeskripsikan implementasi ini, penulis menggunakan 4 variabel yang ditawarkan oleh Edwards (dalam Subarsono, 2011) dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Empat variabel sebagai faktor yang mempengaruhi sekaligus kondisi bagi keberhasilan proses implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Aspek komunikasi merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi implementasi kebijakan. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik tentu akan mewujudkan pelaksanaan kebijakan menjadi baik dan sesuai dengan yang diinginkan (Edwar, 1980). Dalam aspek ini akan dilihat bagaimana cara penyampaian informasi terkait program layanan bajak Gratis, komunikasi antar organisasi

yang terlibat dalam program layanan bajak gratis, dan transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Program Layanan Bajak Gratis dari aspek komunikasi sudah optimal dilakukan antar pihak terkait, hal ini dapat dilihat dari realisasi Program Layanan Bajak Gratis 100% dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Walaupun ada juga sebagian kecil dari petani yang beranggapan bahwa bantuan yang diberikan Pemerintah daerah adalah Bajak (alsintan) sesuai dengan nama program karena tidak sampainya informasi pengertian dari program tersebut kepada petani, sementara yang dibantu dalam program tersebut adalah upah bajak sawah dan peminjaman alsintan.

2. Aspek Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Aspek sumber daya dalam pelaksanaan program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar akan dilihat ketersediaan pengelola brigade alsintan yang kompeten, pelatihan dan pendidikan serta workshop brigade alsintan serta tersedianya anggaran. Terkait aspek sumber daya diatas dapat kita lihat bahwa sumber daya manusia sudah optimal dalam menyampaikan informasi, pelaksanaan program dan tersedianya brigade alsintan selaku pelaksana program mendapatkan pelatihan tentang pelaksanaan program layanan bajak gratis.

3. Sikap birokrasi atau pelaksana, dan disposisi

Disposisi adalah karakteristik dan motivasi yang dimiliki implementator atau pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi, sikap yang baik maka implementator tersebut dapat menjalankan kebijakan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Sikap birokrasi atau pelaksana dan disposisi merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Aspek ini merupakan keinginan dan kemauan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nantinya akan menjadi suatu komitmen yang kuat dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Penting sekali bagi para pelaksana kebijakan untuk menunjukkan komitmennya terhadap suatu kebijakan demi tercapainya tujuan.

Menurut Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan PPTK Program Layanan Bajak Gratis menyampaikan bahwasanya ada dukungan dari OPD terkait untuk pelaksanaan program tersebut. Bahkan karena terbatasnya jumlah petugas brigade alsintan dalam pelaksanaan tugasnya juga dibantu oleh penyuluh pertanian di lapangan.

4. Aspek struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang dalam badan eksekutif yang memiliki hubungan potensial maupun nyata dengan yang mereka miliki dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana atau imlementator mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki sumber daya, namun tidak menutup kemungkinan hal itu masih menghalangi atau menghambat proses implementasi karena struktur organisasi yang dimiliki. Dua ciri utama dari birokrasi adalah standar operasional prosedur dan kebijakan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kebijakan pemerintah tersebut masih menemui kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain: (1) Banyaknya proses administrasi dan SOP yang panjang menyebabkan lamanya pencairan upah (2) Regulasi tentang penyaluran minyak subsidi sehingga bantuan minyak hanya diberikan pada tahun pertama (2022) pelaksanaan program, tahun ke 2 (dua) sampai sekarang bantuan minyak alsintan tidak diberikan dalam program tersebut. Berdasarkan hasil temuan tersebut maka perlu melakukan pengkajian kembali, monitoring dan evaluasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan.

2. Evaluasi Implementasi Program Layanan Bajak Gratis

Pelaksanaan program pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang disusun dan ditetapkan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan. Untuk pelaksanaan kebijakan publik (public policy) yang merupakan keputusan pemerintah dalam memecahkan masalah masyarakat, maka diperlukan evaluasi atau penilaian. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan, meskipun memang tidak ada batasan waktu kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi (Subarsono, 2005). Menurut Jones (2009) evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan menurut Wollmann (2015) didefinisikan sebagai alat dan prosedur analisis yang dimaksudkan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, penelitian evaluasi, sebagai alat analisis, menyelidiki program kebijakan untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan penilaian kinerjanya, baik proses dan hasil. Kedua, evaluasi sebagai tahap dari siklus kebijakan yang umumnya mengacu pada melaporkan kembali informasi tersebut pada proses pembuatan kebijakan.

Amelia (2014) menyatakan, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan melakukan pekerjaan, membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menyediakan kebutuhan rakyat dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan, dan yang paling penting pemerintah harus diakui rakyatnya sehingga dapat berdiri dengan stabil.

Program Layanan Bajak Gratis khusus untuk lahan sawah yang bertanam padi dan dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola, petani penerima memilih salah satu pola dalam program layanan bajak gratis. Bantuan yang diberikan ke petani yaitu bantuan upah sebesar RP 800.000 per Ha per petani, dan diberikan berdasarkan luasan sawah masing-masing petani penerima serta peminjaman alsintan dengan jangka waktu 15 hari per petani. Untuk mendukung pelaksanaan pola tersebut maka dibentuk brigade alsintan yang terdiri dari 1 unit bengkel alsintan, 1 orang admin kabupaten, 4 orang sopir, 1 orang mekanik, 1 orang tenaga keamanan, 14 orang manajer (1 manajer per kecamatan), pengadaan 3 (tiga) mobil pick up, 56 hand traktor.

Tiga (3) pola dalam program layanan bajak gratis yaitu:

1. Pola I: Alsintan dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah.
2. Pola II (Pemberdayaan Alsintan Kelompok Tani): Alsintan disediakan oleh kelompok tani dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah.
3. Pola III (Peminjaman Alsintan Brigade): Alsintan disediakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh petani.

Tiga (3) pola program layanan bajak gratis tersebut sudah dilaksanakan dari tahun 2022 sampai sekarang. Berikut adalah tabel jumlah permohonan/ petani yang mengajukan ke tiga (3) pola program layanan bajak gratis, yaitu:

Tabel 1. Jumlah permohonan/ petani untuk pola program layanan bajak gratis tahun 2022 - 2024

No	Jenis Pola/ Bantuan	Tahun 2022	%	Tahun 2023	%	Tahun 2024	%
1	Pola 1	787	9 %	644	7 %	799	8 %
2	Pola 2	7.231	90 %	7.615	92 %	8.585	91 %
3	Pola 3	10	1 %	16	1 %	91	1 %
Total Permohonan		8.028	100 %	8.275	100 %	9.475	100 %

Sumber: Data hasil penelitian (November 2024) diolah

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah petani paling banyak mengajukan permohonan terdapat pada pola 2 mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan rata-rata permohonan $\pm$ 90 % dari pola 1 dan pola 3. Pada tahun 2022 total petani yang mengajukan permohonan adalah 8.028 permohonan dengan pola 1 sebanyak 787 permohonan, pola 2 sebanyak 7.231 permohonan dan pola 3 sebanyak 10 permohonan. Pada tahun 2023 total petani yang mengajukan permohonan adalah 8.275 permohonan dengan pola 1 sebanyak 644 permohonan, pola 2 sebanyak 7.615 permohonan dan pola 3 sebanyak 16 permohonan. Pada tahun 2024 total petani yang mengajukan permohonan adalah 9.475 permohonan dengan pola 1 sebanyak 799 permohonan, pola 2 sebanyak 8.585 permohonan dan pola 3 sebanyak 91 permohonan.

Target (Ha) dan Realisasi (Ha) Program Layanan Bajak Gratis Tahun 2022 – Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. target dan realisasi tahun 2022-2024

No	Tahun	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase
1	2022	4.200	4204,49	100,1 %
2	2023	4.300	4.309	100,2 %
3	2024	4.300	4.384	101,1 %

Sumber: Data hasil penelitian (November 2024) diolah

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2022 sampai tahun 2024 target yang ditetapkan dalam program layanan bajak gratis terealisasi 100 %, kuota atau target program tersebut yaitu luas lahan sawah hanya diimplementasikan untuk pola 1 dan pola 2. Pola 1 adalah biaya dan alsintan ditanggung oleh pemerintah daerah dan pola 2 adalah biaya ditanggung oleh pemerintah sedangkan alsintan ditanggung oleh kelompok tani tau petani. Sedangkan untuk pola 3 hanya peminjaman alsintan dari pemerintah daerah dan segala biaya pengolahan sawah ditanggung oleh petani.

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Program Layanan Bajak Gratis

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program bajak gratis adalah seluruh faktor internal dan eksternal yang memberikan dukungan dan harapan pada masa sekarang dan masa akan datang. Faktor pendukung dari internal disebut kekuatan dan faktor pendukung dari eksternal disebut peluang. Faktor penghambat adalah seluruh faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program layanan bajak gratis baik masa sekarang atau masa akan datang. Faktor penghambat dari internal disebut kelemahan dan faktor penghambat dari eksternal disebut ancaman.

George C. Edwards III dalam Arifin (2014) mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pernyataan abstraknya, dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan dan pendukung utama dari kesuksesan kebijakan publik.

Kebijakan publik menurut Syafiie (2006) dalam Arifin (2014), kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas

yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Keberhasilan suatu kebijakan pada pelaksanaannya (implementasi) akan dihadapi dengan suatu faktor yang bisa menjadi pendukung atau kendala, kebijakan merupakan kata yang sangat sulit dikenal sehari – hari oleh masyarakat.

Kebijakan berasal dari kata *policy* yang pelaksanaannya mencakup peraturan – peraturan di dalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik (Islamy, 2004 dalam Suwitri 2009), Carl J. Friedrich (Suwitri 2009) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang atau kelompok pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan – hambatan (ancaman) dan kesempatan – kesempatan (peluang) terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

a. Faktor Pendukung

Secara ringkas faktor pendukung internal implementasi program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Faktor Pendukung Internal Implementasi Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar

No	Faktor Pendukung
A.	Kekuatan
1.	Sektor pertanian merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Datar
	Memiliki anggaran khusus program layanan bajak gratis dari APBD Kabupaten
2.	Perhatian Bupati sangat tinggi terhadap pertanian, sehingga program layanan bajak gratis merupakan program unggulan Bupati
3.	Tersedianya sarana dan prasarana
	Memiliki petugas yang memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat digerakkan untuk implementasi
4.	program layanan bajak gratis
5.	Penggunaan teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan data

Sumber: Data hasil penelitian (November 2024) diolah

Sedangkan faktor pendukung eksternal implementasi program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar menurut pembuat kebijakan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4. Faktor Pendukung Eksternal Implementasi Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar

No	Faktor Pendukung
B.	Peluang
1.	Potensi lahan yang luas untuk pelaksanaan program layanan bajak gratis
	Adanya ketersediaan air untuk sawah
2.	Teknologi yang dapat diakses dengan mudah oleh petani, petugas bajak gratis yang dibantu penyuluh
3.	pertanian
4.	Tingginya kemauan petani untuk menikmati program layanan bajak gratis
	Dukungan dari pihak terkait dan stakeholders
5.	Tersedianya alsintan dari kelompok tani dan petani

Sumber: Data hasil penelitian (November 2024) diolah

Dengan demikian terdapat 12 faktor pendukung pada implementasi program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar. Faktor tersebut terdiri dari 6 (enam) faktor pendukung yang berasal dari internal Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan 6 (enam) faktor pendukung yang berasal dari eksternal Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

Badriyah (2022) menyatakan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan program pemerintah dipengaruhi oleh tersedianya sumberdaya dalam menjalankan kebijakan, karakteristik yang melaksanakan program, komunikasi yang lancar serta pemahaman dan pengetahuan pelaksana. Jadi faktor sumberdaya manusia juga merupakan faktor penentu keberhasilan jalannya program yang disusun oleh pemerintah.

b. Faktor Penghambat

Secara ringkas faktor penghambat internal implementasi program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Faktor Penghambat Internal Implementasi Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar

No	Faktor Penghambat
A. Kelemahan	
1.	Jumlah petugas pelaksanaan program masih kurang, terutama petugas adminitrasi dan manajer Bantuan atau upah operator yang diberikan ke petani masih rendah
2.	Kompetensi dan keahlian petugas pelaksanaan program masih belum merata
3.	Keterbatasan jumlah alsintan Keterbatasan jumlah anggaran
4.	Pencairan upah yang lambat sehingga menghambat penyaluran bantuan
5.	
6.	

Sumber: Data hasil penelitian (November 2024) diolah

Sedangkan faktor penghambat eksternal implementasi program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar menurut pembuat kebijakan dapat dilihat pada table di bawah ini: Tabel 6. Faktor Penghambat Eksternal Implementasi Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar

No	Faktor Penghambat
B. Ancaman	
1.	Pertanaman yang tidak serentak sehingga menyebabkan pengukuran tidak dalam satu waktu pada suatu hamparan sawah
2.	Kesulitan dalam akses jaringan atau internet karena pengukuran menggunakan aplikasi
3.	Kelangkaan dan kesulitan dalam pengurusan BBM (pertalite) karena terkait dengan kebijakan pemerintah
4.	Musim Kemarau dan bencana alam (Banjir)
5.	Masih adanya pemerintah kecamatan dan nagari yang belum memahami tentang program layanan bajak gratis
6.	Administrasi dan proses pencairan yang sangat panjang sampai ke Badan Keuangan Daerah (BKD) menyebabkan lamanya pencairan bantuan
7.	Adanya kecemburuan sosial atau ketidaksukaan dari petani yang bukan petani padi

Data hasil penelitian (November 2024) diolah

Dengan demikian terdapat 12 faktor penghambat pada implementasi program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar. Faktor tersebut terdiri dari 6 (enam) faktor penghambat yang berasal dari internal Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan 6 (enam) faktor penghambat yang berasal dari eksternal Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari aspek komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan, dimana komunikasi dalam internal dinas, stakeholders dan sasaran program. Komunikasi yang dilakukan seperti koordinasi antar OPD dan pihak terkait, sosialisasi program, launching program, pemasangan spanduk, penyebaran brosur, pemberitahuan di media sosial, monitoring dan evaluasi di internal dan eksternal dinas sudah berjalan dengan sangat baik walaupun ada sebagian kecil yang belum memahami tentang program layanan bajak gratis dikalangan masyarakat atau pemerintah daerah, kecamatan dan nagari.
2. Aspek sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial/ anggaran, sarana dan prasarana. Ketersedian aspek sumber daya sangat mendukung dalam implementasi program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar. Pada implementasi program terkendala pada keterbatasan anggaran

sehingga kekurangan petugas pelaksana, kekurangan biaya operasional dan target yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan lahan sekitar 19 % dari luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Datar.

3. Aspek sikap birokrasi atau pelaksana dan disposisi, meliputi kemauan dan dukungan dalam implementasi kebijakan program layanan bajak gratis di Kabupaten Tanah Datar, adanya perekrutan petugas program, pelatihan dan insentif berupa biaya perjalanan untuk mendorong sasaran dalam mengimplementasikan program layanan bajak gratis, Secara keseluruhan dari aspek sikap birokrasi dan disposisi sudah optimal, ini terlihat dari sinergisitas antar stakeholder dalam mengimplementasikan program layanan bajak gratis yang sudah berjalan sebagaimana mestinya.
4. Aspek struktur birokrasi meliputi pengelolaan standar operasional prosedur (SOP), sudah ada SOP dan panduan serta sudah dilaksanakan tapi kurang maksimal. Banyaknya proses administrasi, SOP yang panjang menyebabkan terlambat dan lamanya pencairan upah, regulasi tentang penyaluran minyak subsidi sehingga bantuan minyak hanya diberikan pada tahun pertama (2022) pelaksanaan program, tahun ke 2 (dua) sampai sekarang bantuan minyak alsintan tidak diberikan dalam program tersebut.
5. Dalam pengimplementasian program layanan bajak gratis yaitu mengurangi biaya produksi, percepatan tanam, meningkatkan IP (indeks pertanaman, meningkatkan produksi dan peningkatan pendapatan belum terlaksana maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari tahap awal prosedur sampai akhir pelaksanaan program hanya berfokus pada bantuan upah yang diberikan kepada petani.
6. Dalam pengimplementasian program layanan bajak gratis ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal yang bisa menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya program ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan anggaran di Kabupaten Tanah Datar sehingga program layanan bajak gratis dapat diimplementasikan secara maksimal.
2. Karena adanya keterbatasan anggaran dan target program layanan bajak gratis hanya memenuhi 19 % luas sawah di Kabupaten Tanah Datar, sebaiknya penerima atau sasaran program diutamakan kepada masyarakat atau petani yang kurang mampu/ penggarap.
3. Perlunya pengkajian dan peninjauan kembali oleh pemerintah daerah dan OPD terkait prosedur administrasi agar pencairan upah dalam program layanan bajak gratis tepat waktu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Badriyah, Siti. 2022. "Implementasi: Pengertian, Tujuan dan Jenis jenisnya".
- Bahtera, Amrian. 2021. "Kebijakan Pemerintah dan Tujuannya".
https://www.academia.edu/19557443/kebijakan_pemerintah_dan_tujuannya
- Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik – Teori dan Proses dan Studi Kasus. Jakarta: PT. Buku Seru.

- Dinas Pertanian. 2022. Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan Layanan Bajak Gratis. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Trans. Prentice-Hall, Inc. edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC, Congressional Quarterly Press
- Irawan, Prasetya. 2009. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka
- Moleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung
- Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2009. *Public policy*: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, *Risk Management* dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai *the Fifth Estate*, Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati No: 22 tahun 2022 tentang Roadmap Pelaksanaan Program Unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 tahun 2022. Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Bajak Gratis.
- Riant Nugroho. 2012. Public Policy. PT. Alex Media Komputindo Gramedia: Jakarta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafiie, I.K. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta Wahab.
- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Tahir, Arifin, 2014, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, B. (2016.) Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: Buku Seru
- Winarno. Budi. 2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: PT Buku Kita
- Wirawan. 2012. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada